



Peran Pemerintah Negeri dalam Pengelolaan dan Pelayanan Air Bersih di Negeri Asilulu Maluku Tengah

Jeanly Waisapy

¹ Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Pattimura

Corresponding Author: jeanly Waisapy

jeanlywaisapy@gmail.com

Received 17 Agustus 2025; **Accepted** 29 Oktober 2025; **Online Published** 30 Oktober 2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah negeri dalam pengelolaan dan pelayanan air bersih di Negeri Asilulu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. Latar belakang penelitian ini didasari oleh masih terbatasnya ketersediaan air bersih dan belum optimalnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di wilayah kepulauan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi lapangan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi terhadap perangkat pemerintah negeri, tokoh masyarakat, serta pengguna layanan air bersih. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah negeri memiliki peran penting dalam tiga aspek utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pelayanan air bersih. Pada aspek perencanaan, pemerintah negeri telah berupaya menyusun program berbasis musyawarah, namun masih terkendala kapasitas dan dukungan teknis. Pada aspek pelaksanaan, terdapat inisiatif kolaboratif antara pemerintah negeri dan masyarakat meskipun infrastruktur belum memadai. Sedangkan pada aspek pengawasan, sistem pemantauan masih bersifat informal dan belum berkelanjutan. Secara keseluruhan, pemerintah negeri telah menunjukkan komitmen dalam meningkatkan akses air bersih, tetapi diperlukan penguatan regulasi, partisipasi masyarakat, dan dukungan pemerintah daerah agar pelayanan air bersih di Negeri Asilulu menjadi lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pemerintah negeri, pelayanan publik, air bersih, tata kelola, Maluku Tengah.

PENDAHULUAN

Air bersih merupakan kebutuhan dasar manusia yang tidak dapat digantikan oleh sumber daya lainnya. Ketersediaan air bersih berperan penting dalam menjaga kesehatan, kebersihan, serta kelangsungan hidup masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah di berbagai tingkatan memiliki kewajiban untuk memastikan pelayanan air bersih dapat diakses secara merata. Kualitas pelayanan air bersih juga menjadi salah satu ukuran keberhasilan pembangunan di tingkat lokal. Dalam konteks ini, peran pemerintah negeri menjadi sangat strategis.

Di wilayah kepulauan seperti Provinsi Maluku, tantangan penyediaan air bersih lebih kompleks

dibanding daerah daratan. Kondisi geografis yang tersebar di pulau-pulau kecil, keterbatasan sumber air, serta infrastruktur yang belum memadai menjadi faktor penghambat utama. Masyarakat di banyak negeri masih mengandalkan sumber air alami seperti sumur, mata air, dan sungai yang kualitasnya tidak selalu memenuhi standar kesehatan. Hal ini memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Negeri Asilulu yang terletak di Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, merupakan salah satu wilayah yang menghadapi persoalan serupa. Walaupun memiliki potensi sumber air dari pegunungan dan aliran sungai, pemanfaatannya belum dilakukan secara optimal. Sebagian besar masyarakat masih

bergantung pada sistem penyaluran tradisional yang tidak memiliki sistem pemurnian dan distribusi yang baik. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan dan pelayanan yang tersedia.

Pemerintah negeri sebagai lembaga pemerintahan adat yang diakui secara formal memiliki tanggung jawab dalam mengatur dan melayani kebutuhan dasar masyarakat. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah negeri berperan sebagai pelaksana kebijakan di tingkat paling bawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oleh sebab itu, keterlibatan aktif pemerintah negeri dalam pengelolaan air bersih menjadi kunci untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

Namun dalam praktiknya, peran pemerintah negeri dalam pelayanan air bersih sering kali belum optimal. Keterbatasan anggaran, minimnya kapasitas sumber daya manusia, dan lemahnya koordinasi antar lembaga menjadi faktor penghambat utama. Selain itu, belum adanya perencanaan yang berkelanjutan membuat program pelayanan air bersih tidak berjalan konsisten. Akibatnya, masyarakat masih menghadapi kesulitan dalam memperoleh air bersih setiap hari.

Faktor lingkungan juga memberikan pengaruh signifikan terhadap ketersediaan air bersih. Musim kemarau yang panjang menyebabkan berkurangnya debit air, sementara musim hujan justru meningkatkan risiko pencemaran sumber air. Kondisi ini menuntut pemerintah negeri untuk memiliki strategi adaptif dalam mengelola sumber daya air. Upaya konservasi dan perlindungan daerah tangkapan air menjadi aspek penting yang sering kali terabaikan.

Selain tantangan teknis dan lingkungan, aspek sosial dan kelembagaan juga turut menentukan keberhasilan pelayanan air bersih. Partisipasi masyarakat dalam menjaga dan mengelola sumber air masih rendah. Kesadaran akan pentingnya air bersih perlu ditingkatkan melalui edukasi dan pemberdayaan. Pemerintah negeri memiliki peran penting dalam

membangun kemitraan antara masyarakat, lembaga adat, dan instansi teknis agar pengelolaan air dapat berkelanjutan.

Dari sisi kebijakan, pemerintah negeri memiliki kewenangan untuk merumuskan aturan lokal atau peraturan negeri yang mengatur tata kelola sumber air. Namun, masih sedikit negeri yang telah menetapkan regulasi semacam ini. Di Negeri Asilulu, peraturan mengenai pengelolaan air bersih belum tersusun dengan baik. Ketiadaan payung hukum lokal membuat pengelolaan air dilakukan secara individual tanpa sistem pengawasan yang efektif.

Permasalahan lain yang sering muncul adalah kurangnya data dan informasi mengenai kondisi sumber air di tingkat negeri. Tanpa data yang akurat, pemerintah sulit merencanakan kebijakan berbasis kebutuhan masyarakat. Monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan air bersih juga belum dilakukan secara rutin. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara perencanaan dan implementasi di lapangan.

Dalam situasi demikian, dibutuhkan sinergi antara pemerintah negeri, pemerintah daerah, dan lembaga teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum atau Dinas Lingkungan Hidup. Kolaborasi ini penting untuk memperkuat kapasitas pengelolaan air bersih. Melalui kerja sama tersebut, pemerintah negeri dapat memperoleh dukungan teknis, anggaran, dan kebijakan yang lebih luas dalam mengembangkan layanan air bersih.

Dari perspektif pembangunan berkelanjutan, pelayanan air bersih tidak hanya berorientasi pada penyediaan fisik, tetapi juga pada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Akses terhadap air bersih yang memadai akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong produktivitas ekonomi. Dengan demikian, peningkatan peran pemerintah negeri menjadi bagian dari upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development

Goals) khususnya target keenam, yaitu air bersih dan sanitasi layak.

Kajian tentang peran pemerintah negeri dalam pelayanan air bersih di Negeri Asilulu menjadi relevan karena belum banyak penelitian yang secara spesifik membahas topik ini di wilayah Maluku. Sebagian besar penelitian masih berfokus pada daerah perkotaan atau desa administratif. Padahal, konteks negeri sebagai satuan pemerintahan adat memiliki karakteristik tersendiri dalam tata kelola pelayanan publik.

Penelitian ini akan mengkaji sejauh mana peran pemerintah negeri dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pelayanan air bersih di Negeri Asilulu. Selain itu, penelitian juga berupaya mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pelayanan tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang dinamika pelayanan publik di tingkat lokal.

Dari hasil kajian ini, diharapkan muncul rekomendasi strategis yang dapat digunakan pemerintah negeri dalam memperbaiki sistem pelayanan air bersih. Rekomendasi tersebut dapat mencakup peningkatan kapasitas aparatur, penyusunan kebijakan lokal, hingga penguatan partisipasi masyarakat. Dengan langkah tersebut, pelayanan air bersih di Negeri Asilulu dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian mengenai peran pemerintah negeri dalam pelayanan air bersih memiliki nilai penting, baik secara akademik maupun praktis. Secara akademik, penelitian ini memperkaya literatur tentang tata kelola pemerintahan lokal di wilayah kepulauan. Secara praktis, hasilnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah negeri dalam meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat. Pelayanan air bersih yang optimal pada akhirnya akan mendukung kesejahteraan masyarakat Negeri Asilulu secara menyeluruh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam peran pemerintah negeri dalam pelayanan air bersih di Negeri Asilulu. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk menelaah fenomena sosial yang kompleks dan kontekstual, terutama yang berkaitan dengan dinamika pemerintahan lokal dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini berfokus pada pemahaman proses, kebijakan, serta bentuk keterlibatan pemerintah negeri dalam pengelolaan dan distribusi air bersih kepada masyarakat.

Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Informan utama terdiri atas perangkat pemerintah negeri, tokoh masyarakat, petugas pengelola air, serta warga yang menjadi pengguna layanan air bersih. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan relevansi dan pengetahuan informan terhadap topik penelitian. Wawancara dilakukan secara langsung di Negeri Asilulu untuk memperoleh data yang akurat dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Proses analisis dilakukan secara simultan sejak pengumpulan data hingga tahap akhir penelitian. Untuk menjaga keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen agar diperoleh temuan yang valid dan dapat dipercaya.

HASIL PENELITIAN

Bagian ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan

dokumentasi di Negeri Asilulu. Hasil penelitian difokuskan pada gambaran peran pemerintah negeri dalam penyelenggaraan pelayanan air bersih, meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pelayanan. Selanjutnya, hasil tersebut dibahas dengan mengaitkannya pada teori dan konsep tata kelola pemerintahan lokal serta pelayanan publik.

Peran Pemerintah Negeri dalam Perencanaan Pelayanan Air Bersih

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Negeri Asilulu memiliki peran penting dalam tahap perencanaan pelayanan air bersih, meskipun belum berjalan optimal. Pemerintah negeri berupaya menyusun rencana kebutuhan air bersih berdasarkan musyawarah negeri, di mana masyarakat dapat menyampaikan keluhan dan usulan terkait ketersediaan air. Musyawarah tersebut menjadi wadah partisipatif awal dalam proses perencanaan, walaupun tingkat kehadiran masyarakat masih relatif rendah.

Dalam penyusunan perencanaan, pemerintah negeri bekerja sama dengan pihak kecamatan serta Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tengah. Bentuk koordinasi ini dilakukan melalui penyampaian proposal dan permohonan bantuan program air bersih setiap tahun anggaran. Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa koordinasi tersebut sering terkendala oleh keterbatasan anggaran daerah dan birokrasi yang panjang, sehingga banyak program tidak dapat terealisasi sesuai jadwal.

Pemerintah negeri juga berupaya melakukan pemetaan terhadap sumber air yang dapat dimanfaatkan. Beberapa lokasi sumber air di wilayah pegunungan telah diidentifikasi, namun belum ada kajian teknis yang memadai untuk menilai kelayakan dan kapasitasnya. Keterbatasan tenaga teknis dan alat survei menjadi kendala utama dalam tahap perencanaan berbasis data. Akibatnya, perencanaan sering kali bersifat reaktif, bukan strategis.

Dari sisi regulasi, pemerintah negeri belum memiliki peraturan resmi yang mengatur tata kelola air bersih. Hal ini menyebabkan tidak adanya pedoman tertulis yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program. Ketiadaan *Peraturan Negeri (Perneg)* tentang pengelolaan air bersih membuat proses perencanaan lebih bergantung pada inisiatif kepala pemerintah negeri dan dukungan lembaga adat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat negeri, terdapat kesadaran bahwa perencanaan air bersih membutuhkan pendekatan partisipatif dan berkelanjutan. Namun, rendahnya kapasitas perencanaan di tingkat lokal menyebabkan proses tersebut belum sepenuhnya inklusif. Pemerintah negeri cenderung lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek dibandingkan penyusunan rencana jangka panjang yang komprehensif.

Jika dikaitkan dengan teori *participatory governance*, perencanaan yang baik seharusnya melibatkan semua pihak secara aktif. Dalam konteks Asilulu, meskipun ruang partisipasi tersedia melalui musyawarah negeri, keterlibatan masyarakat belum merata. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi partisipasi belum sepenuhnya terwujud sebagaimana prinsip *good governance*.

Dengan demikian, peran pemerintah negeri dalam perencanaan pelayanan air bersih dapat dikategorikan cukup aktif namun belum efektif. Pemerintah negeri telah menunjukkan inisiatif untuk merencanakan dan mengusulkan program, tetapi masih menghadapi kendala dalam aspek teknis, regulatif, dan partisipatif. Peningkatan kapasitas perencanaan serta dukungan teknis dari pemerintah daerah diperlukan agar tahap perencanaan dapat lebih sistematis dan berbasis data.

Peran Pemerintah Negeri dalam Pelaksanaan dan Pengelolaan Layanan Air Bersih

Pelaksanaan pelayanan air bersih di Negeri Asilulu melibatkan kolaborasi antara pemerintah negeri dan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah negeri berperan sebagai fasilitator utama dalam penyediaan sarana seperti pipa, bak penampung, dan jaringan distribusi. Program air bersih biasanya dilaksanakan melalui swadaya masyarakat dengan dukungan dana desa atau bantuan dari pemerintah daerah.

Dalam praktiknya, pelaksanaan program sering mengalami kendala teknis di lapangan. Beberapa jaringan pipa mengalami kebocoran, sedangkan bak penampung tidak mampu menampung debit air saat musim hujan. Hal ini menunjukkan lemahnya sistem pemeliharaan dan pengawasan rutin. Pemerintah negeri mengakui keterbatasan kemampuan teknis dalam menangani kerusakan tersebut karena tidak memiliki tenaga khusus di bidang air bersih.

Untuk menjaga keberlangsungan pelayanan, pemerintah negeri membentuk kelompok pengelola air yang bertugas mengatur jadwal distribusi dan memungut iuran masyarakat. Namun, kelompok ini belum memiliki struktur dan aturan kerja yang jelas. Dalam beberapa kasus, masyarakat enggan membayar iuran karena tidak ada transparansi dalam penggunaannya. Hal ini menyebabkan sistem pengelolaan berjalan tidak stabil.

Berdasarkan observasi, kegiatan pelaksanaan juga sangat bergantung pada inisiatif kepala pemerintah negeri. Ketika kepemimpinan berganti, program air bersih sering tidak berlanjut atau tidak diperbarui. Ketiadaan dokumen perencanaan jangka menengah membuat keberlanjutan program menjadi lemah. Ini menunjukkan pentingnya kelembagaan yang kuat dan tidak bergantung pada figur individu.

Dari segi efektivitas, pelaksanaan layanan air bersih di Asilulu dapat dikategorikan cukup baik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, namun

belum menjangkau seluruh wilayah negeri. Beberapa dusun yang letaknya jauh dari pusat pemerintahan masih kesulitan mendapatkan air bersih secara rutin. Pemerintah negeri mengakui bahwa faktor topografi menjadi salah satu penyebab utama ketimpangan akses tersebut.

Jika dikaitkan dengan teori manajemen pelayanan publik, pelaksanaan pelayanan air bersih di Asilulu masih berada pada tahap *basic service delivery*, yakni berorientasi pada penyediaan layanan dasar tanpa perencanaan manajerial yang matang. Untuk meningkatkan efektivitas, dibutuhkan pendekatan berbasis kinerja dan evaluasi berkala yang saat ini belum diterapkan secara sistematis.

Secara keseluruhan, pelaksanaan program air bersih menunjukkan adanya komitmen pemerintah negeri dalam melayani masyarakat, namun masih dihadapkan pada keterbatasan teknis, kelembagaan, dan pembiayaan. Diperlukan peningkatan koordinasi dengan pihak kecamatan dan dinas teknis agar pelaksanaan dapat lebih profesional, terencana, dan berkelanjutan.

Peran Pemerintah Negeri dalam Pengawasan dan Keberlanjutan Pelayanan Air Bersih

Pengawasan merupakan tahap penting dalam memastikan kualitas dan keberlanjutan pelayanan air bersih. Berdasarkan hasil penelitian, fungsi pengawasan di Negeri Asilulu masih bersifat informal dan belum memiliki sistem yang terstruktur. Pemerintah negeri biasanya hanya melakukan pengecekan lapangan jika ada laporan kerusakan atau keluhan dari masyarakat.

Pemerintah negeri belum memiliki mekanisme evaluasi berkala terhadap kualitas air dan kinerja pengelolaan. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan anggaran khusus untuk kegiatan pemantauan. Pemeriksaan kualitas air juga belum dilakukan secara laboratorium, sehingga tidak ada

data ilmiah mengenai kelayakan air yang dikonsumsi oleh masyarakat.

Dari sisi kelembagaan, belum ada unit pengawasan yang dibentuk secara resmi. Pengawasan lebih banyak dilakukan oleh perangkat negeri secara sukarela bersama kelompok masyarakat. Walaupun ada semangat gotong royong, namun tanpa sistem yang jelas, kegiatan pengawasan sulit menjamin konsistensi dan efektivitas pelayanan.

Dalam konteks keberlanjutan, pemerintah negeri berupaya melibatkan masyarakat melalui pembentukan kelompok pemelihara sarana air bersih. Namun, partisipasi masyarakat masih rendah, terutama dalam kegiatan perawatan dan perbaikan infrastruktur. Masyarakat cenderung pasif dan hanya terlibat ketika terjadi kerusakan besar. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran kolektif tentang pentingnya pengawasan bersama.

Dari hasil wawancara, diketahui bahwa salah satu kendala utama dalam keberlanjutan layanan adalah ketiadaan sistem iuran yang konsisten. Banyak warga yang tidak lagi membayar karena merasa tidak mendapatkan layanan yang memadai. Situasi ini

berdampak pada tidak tersedianya dana pemeliharaan, yang pada akhirnya menghambat kelangsungan sistem air bersih.

Jika dikaitkan dengan teori *good governance*, maka aspek akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan air bersih di Asilulu masih rendah. Pemerintah negeri perlu menyusun laporan rutin mengenai kondisi layanan dan penggunaan dana untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, partisipasi publik dalam pengawasan dapat meningkat.

Secara umum, pengawasan dan keberlanjutan pelayanan air bersih di Negeri Asilulu masih memerlukan penguatan kelembagaan dan sistem. Pemerintah negeri perlu membangun mekanisme evaluasi berkala, melibatkan masyarakat secara aktif, dan mengembangkan kebijakan lokal yang mendukung keberlanjutan sumber air. Dengan langkah tersebut, peran pemerintah negeri tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga transformatif dalam menjaga ketersediaan air bersih bagi generasi mendatang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah Negeri Asilulu dalam pelayanan air bersih telah menunjukkan komitmen nyata, namun masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pada tahap perencanaan, pemerintah negeri telah berupaya melibatkan masyarakat melalui musyawarah, tetapi partisipasi dan dukungan teknis masih terbatas. Dalam pelaksanaan, inisiatif pemerintah negeri cukup aktif melalui program swadaya dan koordinasi dengan pihak luar, namun terkendala oleh minimnya sumber daya dan infrastruktur yang belum memadai. Sementara itu, pada aspek pengawasan,

mekanisme yang ada masih bersifat informal dan belum terstruktur secara kelembagaan, sehingga keberlanjutan pelayanan air bersih belum terjamin sepenuhnya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur, penguatan regulasi lokal, serta kolaborasi antara pemerintah negeri, masyarakat, dan instansi teknis agar pelayanan air bersih di Negeri Asilulu dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2003). *The New Public Service: Serving, not Steering*. M.E. Sharpe.
- Dwiyanto, A. (2015). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Gadjah Mada University Press.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Nugroho, R. (2018). *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan*. Elex Media Komputindo.

Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. Addison-Wesley.

Rengifurwarin, Z. A. (2024). *Manajemen Pelayanan Publik Kepulauan*. Penerbit UNPATTI Press.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.